



PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK
PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I Huruf A terkait Pembagian Urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kewenangan bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur di daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kuota Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2018 sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembayaran Honorarium Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/ M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK 01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyebaran Guru Kontrak Provinsi Maluku untuk Tahun 2018 sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) orang Guru yang tersebar pada :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Kota Ambon sebanyak | : 226 orang |
| 2. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak | : 278 orang |
| 3. Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak | : 182 orang |
| 4. Kabupaten Buru sebanyak | : 131 orang |
| 5. Kabupaten Buru Selatan sebanyak | : 88 orang |
| 6. Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak | : 113 orang |
| 7. Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak | : 127 orang |
| 8. Kota Tual sebanyak | : 82 orang |
| 9. Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak | : 104 orang |
| 10. Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak | : 119 orang |
| 11. Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak | : 80 orang |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Januari 2018

GUBERNUR MALUKU

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 24 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM
GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU
TAHUN 2018 KEPADA KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Suda menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan menajdi prioritas utama dan tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah penyediaan tenaga guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan peningkatan kesejahteraan guru selaku tenaga pengajar di sekolah.

Penyediaan Tenaga Guru Kontrak Provinsi Maluku merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mensiasati kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku.

Hal ini berangkat dari asumsi kekurangan tenaga guru PNS disetiap jenjang pendidikan harus dipenuhi melalui Penyediaan Tenaga Guru kontrak non PNS mengingat rasio guru terhadap siswa yang dibawa standar nasional sehingga berdampak pada kualitas siswa dalam proses pembelajaran.

Terkait hal tersebut maka tata cara pembayaran honorarium guru kontrak Provinsi Maluku Tahun 2018 kepada Kabupaten/Kota perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 KEPADA
 KABUPATEN/KOTA

NO	Kab/Kota	Jlh Guru	Besar Honor (Rp)	TAHAP PEMBAYARAN												Jumlah (RP)
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Kota Ambon	226	1,015,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	229,390,000	2,752,680,000
2	Kab. Malteng	278	1,015,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	282'170,000	3,386,040,000
3	Kab. SBB	182	1,015,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	184,730,000	2,216,760,000
4	Kab. Buru	131	1,015,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	132,965,000	1,595,580,000
5	Kab. Bursel	88	1,015,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	89,320,000	1,071,840,000
6	Kab. SBT	113	1,015,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	114,695,000	1,376,340,000
7	Kab. Malra	127	1,015,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	128,905,000	1,546,860,000
8	Kota Tual	82	1,015,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	83,230,000	998,760,000
9	Kab. Aru	104	1,015,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	105,560,000	1,266,720,000
10	Kab. MTB	119	1,015,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	120,785,000	1,449,420,000
11	Kab. MBD	80	1,015,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,200,000	974,400,000
		1,530		1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	1,552,950,000	18,635,400,000

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF